

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Perumahan merupakan kumpulan rumah yang sebagai bagian hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Permukiman didefinisikan sebagai salah satu dari bagian lingkungan yang berhuni, terdiri atas lebih atau satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan yang lainnya. Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam mendukung kelangsungan hidup dan keselamatan penghuninya. Rumah tidak layak huni kebalikan dari rumah layak huni yang persyaratannya tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang kebijakan perumahan dan kawasan permukiman menyatakan bahwa masyarakat berperan aktif dalam penyediaan perumahan, dalam arti penyediaan perumahan masih menjadi tanggung jawab dari setiap rumah tangga sendiri. Kawasan permukiman kumuh, merupakan kondisi fisik hunian yang tidak layak huni, nilai lahan semakin mahal, kemiskinan penduduk perkotaan yang disebabkan kemampuan pendataan masyarakat yang rendah dan kurang dapat bersaing didalam kehidupan perkotaan menjadi permasalahan awal akan munculnya hunian-hunian kumuh dan dikategorikan sebagai hunian tidak layak (Yahya, 2020).

Permasalahan pada rumah layak huni dan rumah tidak layak huni merupakan hal yang perlu dilakukannya identifikasi ulang terkait bangunan yang dijadikan sebagai hunian maupun fungsi bangunan yang lain. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan suatu kegiatan yaitu pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota tahun 2021 di sebagian wilayah Kelurahan Teluk Bayur, dengan

hasil akhir dari kegiatan pendataan ini berupa laporan tertulis berbentuk data tabulasi mengenai bangunan yang sudah di data. Dari kegiatan tersebut peneliti ikut serta dalam pengambilan data dilapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh instansi dan dapat peneliti gunakan data bangunan tersebut untuk membuat suatu penelitian mengenai pemetaan rumah layak huni dan tidak layak huni dengan menggunakan parameter berbeda-beda yang didapatkan dari kegiatan survei dilapangan dan dari pemanfaatan sistem informasi geografis.

Parameter yang dijadikan untuk menilai rumah layak huni dan rumah tidak layak huni yaitu, memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya. Parameter yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Kementerian PUPR Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan, Infrastruktur Wilayah tentang Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang terbentuk adalah:

1. Bagaimanakah yang digunakan dalam memetakan dan menilai rumah layak huni dan tidak layak huni?
2. Bagaimanakah distribusi spasial RLH dan RTLH berdasarkan parameter pada kuesioner yang dihasilkan dalam *project* pendataan rumah?
3. Bagaimanakah distribusi spasial RLH dan RTLH berdasarkan pada parameter luasan persil bangunan yang dihasilkan dari citra satelit?
4. Bagaimanakah perbedaan penggunaan parameter yang berbeda dalam penentuan klasifikasi RLH dan RTLH di sebagian Kelurahan Teluk Bayur?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai selama proses penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan aspek yang digunakan berdasarkan studi literatur dan mengelompokkannya berdasarkan kriteria rumah layak huni dan rumah tidak layak huni.
2. Untuk membuat distribusi spasial berupa peta rumah layak huni dan rumah tidak layak huni dengan berdasarkan pada parameter kuesioner.
3. Untuk membuat distribusi spasial berupa peta rumah layak huni dan rumah tidak layak huni dengan berdasarkan parameter luasan persil bangunan.
4. Untuk mengetahui perbedaan penggunaan parameter yang berbeda dalam penentuan klasifikasi RLH dan RTLH disebagian Kelurahan Teluk Bayur.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Akademisi

1. Menjadi sarana untuk berinteraksi terhadap hubungan kerja sama antara instansi dengan Poltek Simas Berau.
2. Memanfaatkan penelitian untuk dapat digunakan sebagai sumbangan keilmuan yang bermanfaat bagi dunia Pendidikan Program Studi Survei dan Pemetaan khususnya berkaitan pada pemanfaatan *software* Sistem Informasi Geografis (SIG).

1.4.2 Bagi Instansi

Menjadi acuan dasar berupa peta tentang rumah layak huni dan rumah tidak layak huni sebagai salah satu kebutuhan data yang melengkapi pemetaan terhadap permukiman hunian.

1.4.3 Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja.
2. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh khususnya pada bidang survey dan pemetaan serta pada bidang perumahan.

3. Memanfaatkan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai bidang perumahan dan kawasan permukiman yang perlu didalami pada survey dan pemetaan untuk mengoptimalkan kompetensi mahasiswa sesuai pencapaian.

1.5 Batasan Masalah

Area yang dipetakan terbatas pada RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, dan 22, dan data citra yang digunakan yaitu citra tahun 2020 dengan sumber citra yaitu interpretasi dari berbagai macam citra yang diperoleh dari *Google Earth*.

